

## **BAB II**

### **TELAAH LITERATUR**

#### **2.1 Gambaran Umum Pajak**

Menurut Undang-Undang Pajak Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan menyatakan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bagi negara pajak merupakan hal yang penting dalam menunjang ekonomi negara termasuk Indonesia dengan melihat dari seberapa besar pendapatan negara dari sektor perpajakan, yang sampai sekarang masih menjadi sumber utama dalam Anggaran Pendapatan dan Biaya Negara (APBN).

Dari pengertian pajak sebagaimana yang dikemukakan sebelumnya, Waluyo (2017) mengemukakan bahwa terdapat dua (2) fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

##### *1. Fungsi penerimaan (Budgeter)*

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

## 2. Fungsi mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras demikian pula terhadap barang mewah.

Dalam memungut pajak dikenal 3 (tiga) sistem pemungutan, diantaranya sebagai berikut (Resmi, 2019):

### 1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan aparaturnya perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparaturnya perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparaturnya perpajakan (peranan dominan ada pada aparaturnya perpajakan). Contoh pemungutan pajak dengan *Official Assesment System* adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

### 2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib Pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu

memahami undang-undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak.

Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk:

- a. Menghitung sendiri pajak yang terutang;
- b. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
- c. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
- d. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
- e. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang.

Dengan demikian, keberhasilan atau tidaknya pemungutan pajak sebagian besar tergantung pada Wajib Pajak sendiri. Contoh pemungutan pajak dengan *self assessment system* yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

### 3. *Withholding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penunjukan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan, Keputusan Presiden, dan peraturan lainnya untuk memotong serta memungut pajak, menyetorkan, dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk. Contoh pemungutan pajak dengan sistem *Withholding System* yaitu Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pajak Penghasilan Pasal 23.

## **2.2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 merupakan “Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan (PPh) yang dikenakan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai PPh bersifat Final dengan tarif PPh Final sebesar 0,5%.” Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 2 PP No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 23 Tahun 2018, dijelaskan bahwa kriteria wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang dikenai PPh Final dengan tarif 0,5% sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut:

1. Wajib Pajak orang Pribadi dan badan yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp.4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
2. Tidak termasuk wajib pajak yang dapat dikenai PPh Final dengan tarif 0,5% apabila wajib pajak memilih untuk dikenai PPh berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat 2a, atau Pasal 31 E Undang-Undang Pajak Penghasilan.
3. Tidak termasuk dalam penghasilan yang dapat dikenakan PPh Final dengan tarif 0,5% apabila wajib pajak berpenghasilan dari pekerjaan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas dan wajib pajak berbentuk Bentuk

### Usaha Tetap (BUT)

Dalam pasal 5 PP No. 23 Tahun 2018 menyatakan bahwa jangka waktu pengenaan pajak bersifat final sebesar 0,5% adalah 7 tahun untuk Wajib Pajak orang pribadi, 4 tahun untuk Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma, dan 3 tahun pengenaan pajak untuk wajib Pajak badan berbentuk Perseroan Terbatas (PT). Apabila telah melewati jangka waktu yang telah ditetapkan, wajib pajak akan dikenai PPh berdasarkan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31 E Undang-Undang PPh.

Wajib Pajak tersebut akan tetap dikenakan PPh dengan tarif sebesar 0,5 % untuk wajib pajak yang memiliki peredaran brutonya dalam tahun pajak berjalan telah melebihi Rp. 4.800.000.000 hingga akhir tahun pajak berjalan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7. Namun dalam Tahun pajak berikutnya wajib pajak pada tahun pajak sebelumnya telah memperoleh peredaran bruto lebih dari Rp. 4.800.000.000 akan dikenakan PPh berdasarkan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31 E dalam Undang Undang (PPh).

### **2.3Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku UMKM**

Wajib pajak sangatlah memegang peran penting bagi kelancaran sistem dan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan bahwa “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perundang- undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau potong pajak

tertentu”. Wajib pajak dituntut untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Oleh karena itu, pemerintah terus mengupayakan agar wajib pajak memahami sepenuhnya kewajibannya terhadap negara dan mau melaksanakannya dengan baik kewajiban perpajakannya (Mintje, 2016).

“Wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan atau jasa, tidak termasuk jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, pada 1 (satu) atau lebih tempat kegiatan usaha yang berbeda dengan tempat tinggal wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.” tercantum di Pasal 1 No 7 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/PMK.03/2017 tentang tata cara pendaftaran wajib pajak dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak serta pengukugan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Kegiatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan salah satu bidang usaha yang dapat berkembang dan konsisten dalam perekonomian nasional. UMKM menjadi wadah yang baik bagi penciptaan lapangan pekerjaan yang produktif (Palalangan et al., 2019). Berdasarkan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang “Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang”.

Saat ini Pemerintah mulai fokus pada penerimaan pajak dari sektor swasta dalam upaya peningkatan pertumbuhan penerimaan pajak. Sektor yang dimaksud adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Meskipun UMKM memiliki laba dan omset yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar. Namun, selama krisis moneter yang terjadi sekitar tahun 1997-1998 UMKM merupakan salah satu bidang usaha yang dapat bertahan dan menjadi pemulih perekonomian di tengah keterpurukan akibat krisis moneter pada berbagai sektor ekonomi di Indonesia pada masa itu. Hal ini membuktikan bahwa UMKM dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian negara. (Rahmadhani et al., 2020)

## **2.4 Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Kepatuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata “Patuh” yang berarti suka menurut, taat, disiplin pada aturan, perintah atau sebagainya. Kepatuhan wajib pajak menurut Mintje (2016) adalah perilaku wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya, seperti membuat NPWP, mengisi dengan benar jumlah pajak yang terutang, membayar pajak tepat pada waktunya tanpa ada pemaksaan, serta melaporkan pajak tepat waktu sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya menjadi persoalan yang sangat penting di Indonesia karena wajib pajak yang tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan berdampak negatif terhadap negara yaitu berkurangnya penerimaan kas negara (Perdana & Dwirandra, 2020).

Kepatuhan Wajib Pajak dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri wajib pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Berbeda dengan faktor internal, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak, seperti situasi dan lingkungan di sekitar wajib pajak (Perdana & Dwirandra, 2020)

Kepatuhan wajib pajak seharusnya dapat dibentuk melalui nilai sosial dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Bila dalam masyarakat sudah tertanam nilai-nilai kepatuhan maka bila seseorang melakukan kecurangan akan timbul rasa malu atau bersalah (Rifki Syaputra, 2019). Wajib Pajak di Indonesia



memiliki beberapa kewajiban yang harus dijalani sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan. Pada Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa “kewajiban Wajib Pajak adalah:

1. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
2. Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Penguasa dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
3. Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, serta menandatangani dan menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
5. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

6. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
7. Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.
8.
  - a. Memperlihatkan dan/ atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
  - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/ atau
  - c. Memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksaKewajiban pembukuan menurut perundang-undangan perpajakan telah diatur dalam pasal 28 tentang Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.”

Kepatuhan wajib pajak adalah salah satu komponen penting dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak negara. Salah satu indikator keberhasilan kebijakan perpajakan yaitu jika wajib pajak patuh dalam melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan mengerti semua hal yang terkandung dalam kebijakan tersebut. Hal tersebut disampaikan oleh penelitian yang

dilakukan oleh (Tambun & Riris, 2019). Kriteria Wajib Pajak patuh berdasarkan Peraturan Keuangan (2018) Nomor 39/PMK.03/2018 pasal 3 tentang “Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak adalah sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak
3. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”

Dalam mencapai kepatuhan wajib pajak diperlukan penciptaan iklim perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak, bercirikan:(Qodariyah & Parju, 2020)

1. Wajib pajak paham dan berusaha memahami UU perpajakan
2. Mengisi formulir pajak dengan benar
3. Menghitung pajak dengan jumlah yang benar
4. Membayar pajak tepat pada waktunya.

### **2.4.1 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**

“Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan, wajib mendaftarkan diri pada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan tempat kegiatan usaha Wajib Pajak dan kepada Wajib Pajak diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak”, pernyataan tersebut tercantum dalam Pasal 2 angka 1 “Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dan/atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak dan/atau Pengusaha Kena pajak”. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP menyebutkan “Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya”.

Persyaratan subjektif adalah persyaratan sesuai dengan ketentuan objek pajak dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (2020) yaitu “wajib pajak yang telah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak dalam negeri (Wajib Pajak orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan Wajib Pajak badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia) sedangkan syarat objektifnya adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan

pemotongan/pemungutan penghasilan”. Pemahaman terhadap NPWP di Indonesia belum sepenuhnya merata sehingga tidak sedikit masyarakat yang kurang mengetahui fungsi dari NPWP. Menurut Waluyo (2017) fungsi dari NPWP adalah:

1. Sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak
2. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

Persyaratan-Persyaratan yang diperlukan saat mendaftar NPWP (Usahawan) antara lain: (Muslimah, 2020)

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk
2. Fotokopi Surat Keterangan Usaha atau disebut juga dengan SKU dari kelurahan atau department yang berkaitan dengan bidang usaha yang dijalankan
3. Fotokopi Kartu Keluarga (Wajib apabila yang mendaftar adalah istri)
4. Mengisi formulir pernyataan usaha yang ditandatangani di atas materai Rp. 6000
5. Mengisi formulir pendaftaran NPWP yang sudah disediakan di kantor pajak dengan dibubuhi tanda tangan pemohon.

#### **2.4.2 Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT)**

Pengisian SPT harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP) Pasal 1 angka 11, menyebutkan “Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak dipergunakan untuk pelaporan perhitungan dan/atau

pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT harus diisi dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin dan angka arab, satuan mata uang rupiah dan menandatangani, serta menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak”. Fungsi SPT yaitu sebagai sarana untuk melaporkan tentang: (Resmi, 2019)

1. Pembayaran dan pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atas pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
2. Penghasilan yang merupakan Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak;
3. Harta dan kewajiban; dan/atau
4. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Dari jenis SPT baik SPT Tahunan maupun SPT Masa berbentuk Formulir kertas (*hard copy*) atau E-SPT yaitu data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Langkah-langkah pengisian SPT secara *online* pada dasarnya sama dengan isian SPT secara manual yang dibuat dalam bentuk pertanyaan atau *upload file* SPT yang telah diisi secara manual, hal tersebut disampaikan oleh Waluyo (2017). Menurut Resmi (2019), Tata cara

pengisian SPT diatur sebagai berikut:

1. Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani.
2. Surat Pemberitahuan Wajib Pajak badan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi.
3. Dalam hal Wajib Pajak menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk mengisi dan menandatangani Surat Pemberitahuan, surat kuasa khusus tersebut harus dilampirkan pada surat pemberitahuan.
4. Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan harus dilampiri dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak.
5. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik, tetapi tidak dilampirkan pada Surat Pemberitahuan, Surat Pemberitahuan dianggap tidak lengkap dan tidak jelas, sehingga Surat Pemberitahuan dianggap tidak disampaikan.

Dalam melakukan pengisian SPT, Wajib Pajak diberi kewenangan untuk menghitung besar jumlah pajak terutangya sendiri yaitu dengan sistem *self assessment* yang berlaku di Indonesia. Maka dari itu, perhitungan pajak terutang oleh wajib pajak harus dilakukan dengan benar dan apa adanya.

### 2.4.3 Pembayaran Pajak Terutang

Setelah melakukan pengisian SPT, wajib pajak diperlukan untuk melakukan pembayaran pajak terutang. Menurut Resmi (2019), Pembayaran dan penyetoran pajak dilakukan dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan SSP. Pembayaran dan penyetoran pajak meliputi PPh, PPN, PPnBM, Bea Materai, dan PBB. Pelaksanaan pembayaran/penyetoran pajak dilakukan ke kas negara melalui:

1. Layanan pada loket/*teller* dan/atau.
2. layanan dengan menggunakan sistem elektronik lainnya pada Bank Persepsi/Pos Persepsi/Bank Devisa Persepsi/Bank Persepsi Mata Uang Asing.

SSP (Surat Setoran Pajak) merupakan formulir yang digunakan sebagai bentuk bukti pembayaran pajak maupun bukti setoran pajak ke kas negara ditempat yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Namun, SSP saat ini dapat diisi secara online, yaitu Wajib Pajak perlu mengakses e-billing apabila ingin membayar pajak untuk mendapatkan *ID Billing*. (news.ddtc.co.id). “Kode Billing adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui Sistem Billing Direktorat Jenderal Pajak atas suatu jenis pembayaran atau penyetoran pajak. Aplikasi Billing Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah bagian dari sistem Billing Direktorat Jenderal Pajak yang menyediakan antarmuka berupa aplikasi berbasis web bagi Wajib Pajak untuk menerbitkan Kode Billing dan dapat diakses melalui jaringan internet atau intranet”, tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER.05/PJ/2017 tentang Pembayaran Pajak



Secara Elektronik.

PPh Final Pasal 4 ayat (2) memiliki kode khusus untuk melakukan pembayaran pajak terutang UMKM yaitu dengan kode akun pajak 411128 dengan jenis setoran 420, merupakan kode khusus setoran atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh berdasarkan PPh Final oleh wajib pajak dengan Peredaran Bruto tertentu. (online-pajak.com)

Pembayaran pajak terutang harus dilakukan dengan tepat waktu. Wajib pajak tidak boleh membayar pajak dengan terlambat, karena apabila terlambat akan dikenakan sanksi denda maupun pidana yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% berdasarkan Undang-Undang KUP (2007) pasal 9 ayat 2, untuk wajib pajak yang membayar pajak setelah jatuh tempo. Jatuh tempo pembayaran PPh Final menurut DJP yaitu:

1. Untuk yang dipotong, tanggal 10 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.
2. Pada setoran yang dilakukan sendiri, tanggal 15 bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir.

#### **2.4.4 Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT)**

Surat pemberitahuan (SPT) menurut Resmi (2019) merupakan sarana untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. Berdasarkan definisi tersebut, ditegaskan fungsi SPT bagi Wajib Pajak (Waluyo, 2017):

1. Bagi Pengusaha

Bagi pengusaha bahwa SPT Pajak Penghasilan yaitu berfungsi sebagai

sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

- a. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) tahun pajak atau bagian tahun pajak
- b. Penghasilan yang merupakan objek pajak dan/atau bukan objek pajak
- c. Harta dan kewajiban dan/atau
- d. Pembayaran dan penyetoran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

## 2. Bagi Pengusaha Kena Pajak

Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi SPT adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang untuk melaporkan tentang:

- a. Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran; dan
- b. Pembayaran dan pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu masa pajak, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

## 3 Bagi Pemotong atau Pemungut Pajak

Bagi Pemotong atau pemungut pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah

sebagai sarana melaporkan dan mempertanggungjawabkan pajak yang dipotong atau dipungut dan disetornya. Pengertian mengisi SPT dimaksudkan yaitu mengisi formulir SPT dalam bentuk kertas dan/atau dalam bentuk elektronik, dengan benar, lengkap, jelas sesuai dengan petunjuk pengisian yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Sebelum menyampaikan SPT wajib pajak harus memiliki EFIN (*Electronic Filing Identification Number*). Wajib Pajak datang sendiri ke KPP tempat terdaftar untuk meminta EFIN dengan mengisi formulir permohonan aktivasi EFIN dan menunjukan KTP atau Paspor dan NPWP atau Surat Keterangan Terdaftar (SKT) serta menyampaikan alamat *e-mail* aktif. Bagi wajib pajak badan, harus menunjuk pengurus untuk mewakili Wajib Pajak. Satu hari setelah aktivasi, KPP akan mengirim EFIN kepada Wajib Pajak melalui *e-mail*. EFIN digunakan sebagai sarana untuk *log in* pada saat melaporkan pajak menggunakan *e-filing*. Menurut Sari, Arinta Wulan (2016), indikator ketepatan dalam pelaporan SPT yaitu:

1. Wajib pajak jelas dalam mengisi formulir SPT (memuat unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT) dan melaporkannya tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Wajib pajak benar dalam mengisi formulir SPT (benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan).

3. Wajib pajak lengkap dalam mengisi formulir SPT (memuat unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT) dan melaporkannya tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Penyampaian SPT tahunan dapat dilakukan secara elektronik atau secara *online* dan *realtime* melalui internet pada *website* DJP [www.djponline.pajak.go.id](http://www.djponline.pajak.go.id) atau ASP (*Application Service Provider*- Penyedia Jasa Aplikasi). Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan digunakan untuk pelaporan tahunan, SPT Tahunan terdiri atas (Siti Resmi, 2019):

1. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan (1771-Rupiah);
2. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan yang diizinkan menyelenggarakan pembukuan dalam bahasa inggris dan mata uang dolar Amerika Serikat (1771-US);
3. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau norma perhitungan penghasilan neto; dari satu atau lebih pemberi kerja; yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final; dan dari penghasilan lain (1770);
4. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan lebih dari satu pemberi kerja; dalam negeri lainnya; dan yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final (1770S);
5. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja dan tidak mempunyai penghasilan lainnya kecuali bunga bank dan/atau Bunga koperasi (1770SS).

Wajib Pajak Perlu memperhatikan batas waktu penyetoran dan pelaporan dari masing-masing pajak. Direktorat Jenderal Pajak menjelaskan dalam website resminya ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)), untuk “Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi (OP) Non Karyawan:

1. Batas waktu penyampaian SPT-nya adalah Paling lama 3 bulan setelah akhir Tahun Pajak.
  - a. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun Kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
  - b. Dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT Tahunan adalah WP OP yang dalam satu tahun Pajak menerima atau memperoleh penghasilan neto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
  - c. Kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT Tahunan PPh harus dibayar lunas sebelum SPT PPh disampaikan.
2. Untuk SPT Masa ditetapkan batas waktu penyampaian SPTnya adalah paling lama 20 hari setelah akhir Tahun Pajak”.

“Setiap orang yang karena kealpaannya tidak menyampaikan surat pemberitahuan atau menyampaikan surat pemberitahuan tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan perbuatan tersebut merupakan perbuatan setelah perbuatan yang pertama kali dilakukan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13A UU KUP, denda paling sedikit 1

(satu) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar, atau pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan atau paling lama 1 (satu) tahun”, tercantum dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

## **2.5 Tarif Pajak**

Pungutan pajak tidak terlepas dari keadilan, dengan keadilan dapat menciptakan keseimbangan sosial yang sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam penetapan tarif harus berdasarkan pada keadilan. Dalam perhitungan pajak yang terutang dikenakan tarif pajak. Tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar). Besarnya tarif pajak dapat dinyatakan dengan persentase. Dalam menghitung pajak terutang dikenal 4 macam tarif, sebagai Berikut: (Waluyo, 2017)

### **1. Tarif Pajak Proporsional/Sebanding**

Tarif Pajak proporsional yaitu tarif pajak berupa persentase tetap terhadap jumlah berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10% atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)

### **2. Tarif Pajak Progresif**

Tarif Pajak Progresif adalah tarif pajak yang persentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaannya semakin besar. Contohnya tarif pajak Pasal 17 ayat 1 UU PPh.

### **3. Tarif Pajak Degresif**

Tarif Pajak Degresif adalah persentase tarif pajak yang semakin menurun

apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak semakin besar.

#### 4. Tarif Pajak Tetap.

Tarif pajak tetap adalah tarif berupa jumlah yang tetap (sama besarnya) terhadap berapa pun jumlah yang menjadi Dasar Pengenaan Pajak.

Contohnya Tarif Bea Materai

Besarnya tarif pajak harus disesuaikan dengan tingkat penghasilan wajib pajak, sehingga wajib pajak yang memiliki penghasilan tinggi wajar apabila membayar pajak penghasilan yang lebih besar dari pada penerima penghasilan rendah. Menurut Resmi (2019), untuk menghitung besarnya pajak yang terutang diperlukan dua unsur, yaitu tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak dapat berupa angka atau persentase tertentu. Tarif pajak UMKM dibuat tidak untuk memberatkan Wajib pajak, karena pemerintah telah menurunkan tarif PPh Final dari 1 % berdasarkan PP 46 Tahun 2013 yang dirasa besar menjadi 0,5 % yang tercantum dalam PP No. 23 Tahun 2018. Berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, 2018). Tarif pajak penghasilan yang bersifat Final atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh dari:

1. Wajib Pajak orang pribadi; dan
2. Wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan, komanditer, firma, atau perseroan terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 menyatakan Wajib Pajak yang dapat dikenakan tarif PPh Final adalah Wajib Pajak yang memiliki Kriteria

sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak orang pribadi/badan yang tidak termasuk bentuk usaha tetap.
- b. Menerima Menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi RP.4.800.000.000,00 (empat milyar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun pajak dikenai Pajak Penghasilan bersifat final sebesar 0,5 % (nol koma lima persen). Tidak termasuk penghasilan dari usaha yang dikenai pajak Penghasilan yang bersifat final sebagai berikut:
  - a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas;
  - b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar diluar negeri.
  - c. Penghasilan yang telah dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri, dan
  - d. Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Kebijakan tarif baru diharapkan dapat menstimulasi bisnis UMKM, mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal dengan cara memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan diberikan jangka waktu tertentu. Oleh karena itu pemerintah berharap dengan diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018 ini dapat menjangkau Wajib Pajak baru (Rahmadhani et al., 2020).



## **2.6 Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Pengertian Tarif Pajak yang disampaikan oleh Putra dan Waluyo (2020) merupakan persentase yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang terutang. Besarnya tarif final UMKM saat ini adalah 0,5%, penurunan tarif ini bertujuan untuk memberikan motivasi wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak dan memberikan keadilan bagi wajib pajak UMKM. Tarif pajak yang adil dan tidak memberatkan bagi WP UMKM dapat mendorongnya dalam mematuhi kewajiban perpajakan setiap bulan. Semakin adil tarif pajak yang pemerintah tetapkan, maka semakin tinggi pula kepatuhan WP UMKM untuk melaporkan penghasilan kepada administrasi pajak. (Cahyani & Noviani, 2019)

Penetapan tarif pajak bagi wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah dinilai sudah adil dan tepat yaitu 0,5% dari atas omset maksimal yaitu Rp. 4.800.000.000 per tahun karena hasil yang didapat mempunyai pengaruh pada ketaatan. Semakin adil atau tepat dalam penetapan tarif pajak yang dikenakan atas penghasilan maka wajib pajak akan patuh terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah (Sulistianingsih & Sari, 2019). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Cahyani dan Noviani (2019) menyatakan bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan penjelasan mengenai Tarif Pajak, maka dirumuskan

hipotesis sebagai berikut:

**Ha<sub>1</sub>: Tarif pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.**

## **2.7 Pemahaman Perpajakan**

Definisi Pemahaman perpajakan menurut Rifki Syaputra (2019) adalah segala hal terkait perpajakan yang dimengerti dengan baik dan benar oleh wajib pajak serta dapat menerjemahkan dan/atau menerapkan yang telah dipahaminya. Menurut Elvionita (2018), Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan. Pemahaman perpajakan diperlukan untuk memudahkan wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Pemahaman pajak meliputi perhitungan pajak, penyetoran pajak, pelaporan pajak dan pengisian SPT. Semua itu dapat dilakukan oleh wajib pajak secara mudah jika wajib pajak memiliki pemahaman tentang perpajakan yang berlaku. (Palalangan et al., 2019)

Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang sebelumnya tercantum dalam PP Nomor 46 Tahun 2013, sejak 1 Juli 2018 peraturan pemerintah ini telah diubah menjadi PP No. 23 Tahun 2018. Perubahan terkait peraturan pemerintah No. 23 tahun 2018 tentang wajib pajak UMKM dibuat untuk memudahkan UMKM dalam melakukan perhitungan dan pembayaran pajak setiap bulannya. Tentunya Wajib Pajak UMKM harus memiliki pemahaman yang baik terkait peraturan tersebut terutama tentang penurunan

tarif final 0,5% bagi pengusaha dengan peredaran bruto kurang atau sama dengan 4,8 Milyar. (Cahyani & Noviari, 2019).

Wajib pajak juga perlu memahami bahwa NPWP berfungsi sebagai identitas wajib pajak dan setiap wajib pajak harus memilikinya. Pasal 1 angka 6 UU KUP menyebutkan Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Fungsi NPWP:

1. Sarana administrasi bagi Wajib Pajak dalam setiap melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan antara lain penyetoran dan pelaporan pajak.
2. Tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam setiap melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan,

Pajak terutang tidak boleh terlambat atau tidak dibayar oleh wajib pajak, karena apabila terlambat wajib pajak dapat dikenakan sanksi baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana yang ditetapkan pada Undang-Undang KUP (2007) pasal 9 ayat 2. Untuk itu wajib pajak perlu mengetahui jatuh tempo pembayaran PPh Final untuk UMKM yang telah ditentukan oleh Menteri Keuangan yaitu pajak terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak wajib dibayar yaitu paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Selain itu, Wajib Pajak juga perlu mengetahui batas waktu pelaporan bagi usaha yang sedang dijalankannya. Batas waktu pelaporan atau penyampaian untuk SPT Masa yaitu paling lama 20 hari setelah akhir Tahun pajak.

Jangka waktu pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat Final seperti yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, yaitu:

- a. 7 (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi
- b. 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma
- c. 3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas

## **2.8 Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Menurut Rifki Syahputra (2019), pemahaman diartikan sebagai proses dari berjalannya pengetahuan seseorang, perbuatan atau cara memahami. Tingkat pemahaman WP UMKM atas perpajakan dapat dinilai dari pemahaman dalam menghitung pajak terutang, membayar pajak dan melaporkan pajak terutang. Tingkat pemahaman yang tinggi akan mendorong Wajib Pajak UMKM agar mematuhi dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi pemahaman perpajakan yang dimiliki wajib pajak maka hal itu seiringan dengan semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak (Cahyani & Noviari, 2019).

Ketika wajib pajak paham terkait peraturan perpajakan dengan baik akan membuat wajib pajak lebih mampu melaksanakan kewajiban pajaknya dibandingkan dengan wajib pajak yang tidak memahami peraturan yang berlaku. Semakin tingginya tingkat pemahaman peraturan dan kebijakan

perpajakan di masyarakat, akan lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak dengan sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak tertentu. (Palalangan et al., 2019) Ketidakpahaman mengenai prosedur pajak seringkali membuat masyarakat tidak mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak. Ketidaktahuan akan prosedur pajak juga dapat membuat Wajib Pajak tidak menjalankan kewajiban pajaknya sesuai dengan prosedur perpajakan yang berlaku. Prosedur pajak merupakan serangkaian cara yang dilalui dalam melakukan kewajiban pajak. Jika Wajib Pajak tidak memahami prosedur pajak, hal ini dapat menimbulkan permasalahan dalam menjalankan kewajiban pajak bagi Wajib Pajak yang bersangkutan. Wajib pajak yang memiliki pemahaman perpajakan yang baik, diharapkan tingkat kepatuhan dalam perpajakan juga semakin tinggi, wajib pajak juga akan semakin mengetahui peran dan manfaat dari pajak yang dibayarkan, dan diharapkan dapat meningkatkan kemauan wajib pajak dalam membayar pajak (Naufal & Setiawan, 2018).

Hal tersebut sesuai dengan pemahaman Imaniati (2016), pemahaman menunjukkan seberapa mengerti seseorang terhadap sesuatu. Apabila wajib pajak memahami perpajakan, hal ini akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Sebaliknya, jika wajib pajak tidak memahami perpajakan maka wajib pajak akan cenderung tidak mematuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Rifki Syahputra (2019) Pemahaman wajib pajak mengenai prosedur perpajakan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak, sehingga wajib pajak dapat mengetahui kapan seharusnya ia mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, melaporkan

SPT masa dan tahunan serta melaporkan pajak tepat pada waktunya. Sehingga pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Cahyani dan Noviari (2019), menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Imaniati (2016) yang menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan penjelasan mengenai Pemahaman Perpajakan, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**Ha<sub>2</sub>: Pemahaman Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.**

## **2.9 Mekanisme Pembayaran Pajak**

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu mekanisme pembayaran pajak. Hal ini diperlukan pemahaman atas mekanisme pembayaran pajak dengan memberikan pengetahuan bagaimana tata cara wajib pajak dalam menghitung, menyetor, dan melaporkan jumlah pajak terutang. Pembayaran pajak saat ini dilakukan dengan metode *Self Assesment System*, tujuannya yaitu agar dalam pembayaran pajak wajib pajak dapat berpartisipasi langsung sesuai dengan peraturan perpajakan (Ma'ruf & Supatminingsih, 2020). Menurut Waluyo (2018), wajib pajak bertanggung jawab atas penentuan sendiri kewajiban pajak dan kemudian secara akurat membayar pajak sesuai jumlah yang terutang serta wajib melaporkan pajak dengan tepat waktu.

Pemahaman atas mekanisme pembayaran pajak meliputi pemahaman yang baik atas perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak. Indikator pemahaman atas mekanisme pembayaran pajak terdiri dari: (Machfiroh et al., 2020)

1. Pemahaman terkait pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) dengan baik dan benar
2. Pemahaman terkait kemampuan menghitung jumlah pajak terutang sesuai tarif yang tercantum dalam ketentuan perpajakan
3. Pemahaman mengenai pembayaran dan penyetoran pajak dengan tepat waktu
4. Pemahaman cara melaporkan besarnya pajak terutang di tempat wajib pajak terdaftar.

Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk menghitung pajak yang harus dibayar dengan benar atau sesuai dengan kegiatan usaha wajib pajak. Pengisian SPT untuk orang pribadi UMKM atau pemilik usaha yang memiliki omset di bawah Rp 4,8 miliar pertahun, menggunakan tarif pajak penghasilan (PPh) final UMKM 0,5% yang bersumber dari peraturan pemerintah No. 23 Tahun 2018. Sebelum mengisi SPT secara online, diwajibkan untuk melakukan registrasi ke DJP online dan menyiapkan dokumen terkait nominal peredaran bruto UMKM wajib pajak. Dokumen yang perlu dipersiapkan dalam melakukan pengisian SPT Tahunan yaitu, Bukti Potong PPh (jika ada), Kartu Keluarga, Daftar Harta, Daftar Utang, Catatan Omset per bulan, dan bukti penyetoran PPh Final.

Pembayaran Pajak SPT Masa untuk PPh Final PP No 23 Tahun 2018

memiliki batas waktu pembayaran paling lambat yaitu tanggal 15 bulan berikutnya dan batas waktu pelaporan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Pelaporan SPT Masa harus dilakukan dengan tepat waktu setiap bulannya ke kas negara atau ke KPP tempat wajib pajak terdaftar, karena bagi wajib pajak yang terlambat atau tidak membayar pajak dapat diberikan sanksi administrasi dan sanksi pidana. Setelah wajib pajak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, maka wajib pajak akan mendapatkan bukti bayar pajak atau NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan Negara)

Selain SPT Masa, terdapat juga SPT Tahunan yang wajib di laporkan dengan tepat waktu setiap tahunnya. Seperti yang sudah diketahui, wajib pajak memiliki kewajiban tidak hanya dalam membayar pajak tetapi juga terdapat kewajiban pelaporan SPT. Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk melaporkan seluruh kegiatan usaha dalam Surat Pemberitahuan (SPT) Masa dan Tahunan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Untuk wajib pajak orang pribadi UMKM, setelah menyetorkan pajak menggunakan tarif berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 sebesar 0,5%, diwajibkan untuk melaporkan SPT Tahunan jenis formulir 1770 dan wajib dilaporkan paling lama tanggal 31 Maret tahun berikutnya. Dalam melaporkan Pajak UMKM, wajib pajak wajib untuk memiliki *ID-Billing* atau kode pembayaran yang tersedia di laman resmi web Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan pembayaran sendiri ke Kas Negara melalui bank persepsi atau kantor pos yang ditunjuk langsung oleh kementerian keuangan.



Penyampaian SPT Tahunan dapat dilakukan dengan datang langsung ke KPP atau melalui *e-filling/e-form*, melalui kantor pos, melalui jasa ekspedisi atau melalui penyedia jasa aplikasi perpajakan. Karakteristik Formulir 1770 untuk SPT Orang Pribadi, yaitu mempunyai penghasilan: (Pajak.go.id)

1. Dari usaha/pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau norma perhitungan penghasilan netto dari satu atau lebih pemberi kerja
2. Dari yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final
3. Dari penghasilan lain

Wajib Pajak juga memiliki kewajiban untuk memenuhi kewajiban apabila terdapat tunggakan pajak selama ini, karena salah satu kriteria Wajib Pajak patuh berdasarkan Peraturan Keuangan Nomor 39/PMK.03/2018 pasal 3 tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak adalah tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.

## **2.10 Pengaruh Mekanisme Pembayaran Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak yaitu mekanisme pembayaran pajak. Mekanisme pembayaran pajak yang dimaksud yaitu bagaimana tata cara Wajib Pajak dalam menghitung, menyetor dan melaporkan jumlah pajak terutang. Direktorat Jenderal Pajak sudah menyediakan situs yang bisa diakses oleh masyarakat untuk mempermudah cara pembayaran dan pelaporan pajak diantaranya *e-banking*, *e-SPT*, dan *e-filling*.

Direktorat Jenderal (Dirjen) Pajak sebagai institusi pemungut pajak sudah

banyak melakukan kemajuan, namun berdasarkan pandangan publik, pajak masih menimbulkan beberapa kerumitan, seperti pengurusan nomor pokok wajib pajak (NPWP), pengisian SPT, serta antrian panjang saat pelaporan pajak. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Machfiroh (2020), menyatakan bahwa mekanisme pembayaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan penjelasan mengenai Mekanisme Pembayaran Pajak, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**Ha<sub>3</sub>: Mekanisme Pembayaran Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.**

## **2.11 Sanksi Perpajakan**

Sanksi adalah salah satu tindakan yang diberikan kepada orang melanggar peraturan. Sanksi pajak merupakan hal yang sangat dihindari oleh wajib pajak. Sanksi pajak adalah hukuman negatif yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan, sedangkan denda adalah hukuman dengan cara membayar uang karena melanggar peraturan hukum yang berlaku (Palalangan et al., 2019). Terdapat karakteristik wajib pajak yang dapat mengurangi pengeluaran terhadap jumlah pajak mereka, salah satunya *tax avoidance*. Tindakan *tax avoidance* diperbolehkan apabila masih di dalam ketentuan perpajakan, namun sanksi perpajakan diperlukan untuk mencegahnya agar dapat menekan angka *tax avoidance*, sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara (Halimi & Waluyo, 2019).

Wajib pajak perlu memahami sanksi perpajakan dengan baik, karena terdapat sanksi pajak yang diberikan apabila wajib pajak yang tidak patuh. Sanksi perpajakan menurut Palalangan (2019) adalah jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dipatuhi atau alat untuk mencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi perpajakan dibedakan menjadi dua, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi administrasi terbagi atas 3 jenis yaitu: denda, bunga, dan kenaikan. Sementara sanksi pidana terbagi atas 3 yaitu: denda pidana, kurungan, dan penjara. Sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada wajib pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma. Denda pidana dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran maupun bersifat kejahatan. Pidana kurungan hanya diancamkan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. (Manalu et al., 2016)

Pasal 9 ayat 1 UU KUP No. 28 Tahun 2007, Menteri keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak. Pembayaran/penyetoran masa pajak yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan sesuai Pasal 9 ayat 2a UU KUP.

Berdasarkan teori pengambilan keputusan, pemberian sanksi yang berat

adalah suatu alternatif yang diharapkan dapat mengatasi ketidakpatuhan wajib pajak dalam pembayaran pajak terutang. Sanksi pajak ditetapkan bertujuan untuk memotivasi wajib pajak dalam mematuhi peraturan pajak (Cahyani dan Noviari, 2019). Untuk itu sanksi perpajakan merupakan salah satu cara yang efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan.

Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang disampaikan oleh Pratama (2019), menjelaskan terkait sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

#### 1. Sanksi Administrasi:

##### a. Pengenaan bunga (UU KUP Pasal 9 ayat 2a dan 2b)

1) Ayat 2(a) dikatakan, wajib pajak yang membayar pajaknya setelah jatuh tempo akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo hingga tanggal pembayaran.

2) Pada Ayat 2(b) disebutkan, wajib pajak yang baru membayar pajak setelah jatuh tempo penyampaian SPT tahunan akan dikenakan denda sebesar 2% per bulan, yang dihitung sejak berakhirnya batas waktu penyampaian SPT sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh satu bulan.

##### b. Sanksi Kenaikan

Sanksi kenaikan ditujukan kepada wajib pajak yang melakukan

pelanggaran tertentu seperti tindakan pemalsuan data dengan mengecilkan jumlah pendapatan pada SPT setelah lewat 2 tahun sebelum terbit SKP. Kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar dengan kisaran 50% dari pajak yang kurang dibayar tersebut.

c. Sanksi Denda

Sanksi pajak berupa denda ditujukan kepada pelanggaran yang berhubungan dengan kewajiban pelaporan baik itu tidak melaporkan SPT atau terlambat melaporkan SPT.

- 1) Rp500.000 - untuk Surat Pemberitahuan Masa PPN
- 2) Rp100.000 - untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya
- 3) Rp1.000.000 - untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan
- 4) Rp100.000 - untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi

2. Sanksi Pidana

Sanksi pidana dikenakan bila wajib pajak melakukan pelanggaran berat yang menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dan dilakukan lebih dari satu kali. Contohnya pada UU KUP pasal 39 ayat 1 menyatakan sanksi pidana bagi orang yang tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Sanksi tersebut adalah pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda minimal 2 kali pajak terutang dan maksimal 4 kali pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang dibayar.

Sanksi pajak diberikan bukan karena untuk merugikan wajib pajak

maupun menguntungkan petugas pajak atau negara. Sanksi pajak diberikan kepada wajib pajak agar taat kepada peraturan perpajakan. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakan bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikan wajib pajak (Sulistianingsih & Sari, 2019). Menurut Waluyo (2017), Wajib Pajak kemungkinan dapat melakukan tindak pidana yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, yaitu setiap orang dengan sengaja:

1. Tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan hak Nomor Pokok Wajib Pajak; atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (Pasal 2 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)
2. Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak
3. Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan
4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap
5. Menolak untuk dilakukan pemeriksaan (Pasak 29 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan)
6. Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar atau tidak menggambarkan yang sebenarnya.;
7. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan;
8. Tidak memperlihatkan atau tidak meminjam buku, catatan, atau dokumen lainnya;

9. Tidak menyimpan buku, catatan, atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi *online* di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (11) Undang-Undang KUP; atau

10. Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

sehingga dapat dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Sanksi perpajakan yang diberikan diharapkan dapat membuat wajib pajak jera dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

## **2.12 Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Sanksi perpajakan menurut (Nainggolan & Patimah, 2019) adalah jaminan atas ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) yang akan dituruti, ditaati, dipatuhi atau dijalani. Sanksi perpajakan dianggap sebagai tindakan untuk mencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan. Sanksi pajak juga dapat digunakan sebagai hukuman untuk wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan. Sehingga, ketika wajib pajak menganggap bahwa sanksi pajak yang ditanggung lebih besar dibandingkan besarnya pajak yang harus dibayarkan kepada negara, maka wajib pajak tersebut akan lebih patuh dan dengan sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya (Irmawati, 2019).

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Imaniati (2016), menyatakan bahwa Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari D.k.k. (2019), yang menyatakan bahwa Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Berdasarkan penjelasan mengenai Sanksi Perpajakan, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**Ha<sub>4</sub>: Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.**

## **2.13 Kesadaran Wajib Pajak**

Menurut Rahmadhani d.k.k (2020), Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Pengertian kesadaran perpajakan yang disampaikan oleh Manalu (2016), adalah keadaan dimana wajib pajak memiliki kerelaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan termasuk rela berkontribusi dalam hal memberikan dana untuk berbagai pelaksanaan fungsi pemerintahan dengan cara berkontribusi membayar kewajiban pajak yang ada. Sedangkan menurut Yuliani dan Setyaningsih (2020), kesadaran pajak merupakan keadaan atau sikap dimana wajib pajak mengerti, memahami, mengakui, dan menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta mempunyai rasa kesungguhan dan rasa keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai



dengan undang-undang. Kesadaran pajak selain untuk kepatuhan pajak juga menimbulkan sikap kritis dalam menyikapi perpajakan, seperti kebijakan-kebijakan pajak yang ditetapkan pemerintah.

Wajib pajak perlu sadar akan adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan. Menurut Perdana dan Dwirandra (2020), Bila seseorang hanya mengetahui dan tidak memahami serta tidak melaksanakan ketentuan (hukum pajak) berarti kesadaran hukum orang tersebut masih rendah. Menurut Wulan (2016), Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran apabila sesuai dengan hal-hal berikut:

1. Mengetahui adanya undang-undang dan ketentuan perpajakan
2. Mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan negara.
3. Memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan suka rela.
5. Menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.

Kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila dikaitkan dengan Undang Undang (UU) Perpajakan yang berlaku, terdapat empat hal yang diharapkan atau dituntut dari para wajib pajak, yaitu (Nainggolan & Patimah, 2019):

1. Dituntut kepatuhan (*compliance*) wajib pajak dalam membayar pajak yang dilaksanakan dengan kesadaran penuh.
2. Dituntut tanggung jawab (*responsibility*) wajib pajak dalam menyampaikan atau memasukan Surat Pemberitahuan tepat waktu

3. Dituntut kejujuran (*honesty*) wajib pajak dalam mengisi Surat Pemberitahuan sesuai dengan keadaan sebenarnya
4. Memberikan Sanksi (*law enforcement*) yang lebih berat kepada wajib pajak yang tidak taat pada ketentuan yang berlaku.

Seperti yang sudah diketahui, fungsi pajak yaitu salah satunya untuk pembiayaan negara. Apabila pembiayaan negara berjalan dengan lancar maka pembangunan dan perkembangan negara dapat semakin bertumbuh. Salah satu upaya pemerintah untuk mengumpulkan pembiayaan negara yaitu dengan cara melakukan pembayaran pajak. Namun, UMKM belum menghasilkan sumber pajak yang maksimal disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, pemahaman perpajakan, dan kesadaran akan pentingnya pembayaran pajak (Fauzi, 2019),. Kesadaran perpajakan diberikan kepada wajib pajak agar wajib pajak sukarela untuk memberikan kontribusi dana untuk pelaksanaan fungsi pemerintah, dengan cara secara sadar menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar dan tepat waktu (Mintje, 2016)

## **2.14 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

Tingkat kesadaran akan mempengaruhi keputusan wajib pajak untuk berperilaku patuh atau tidak terhadap kewajiban perpajakannya. Masyarakat yang memiliki kesadaran perpajakan berarti mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan atas pembayaran yang dilakukan dan juga tidak merasa adanya paksaan dari pemerintah. Faktor kesadaran masyarakat untuk membayar pajak mempengaruhi dalam penerimaan pajak. Semakin tinggi tingkat

kesadaran, maka wajib pajak akan semakin terdorong untuk mengambil keputusan yakni patuh terhadap kewajiban perpajakan (Wahyuni & Purnamawati, 2020). Saat wajib pajak mengerti mengenai arti dan fungsi pajak pada pembangunan negara, maka wajib pajak akan sadar terhadap pentingnya pajak. Sehingga, semakin tinggi kesadaran perpajakan semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak (Irmawati, 2019)

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Tambun dan Riris (2019) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan setiap individu memiliki pengaruh kesadarannya dalam membayar pajak. Kesadaran wajib pajak yang tinggi akan semakin mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya dengan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, melaporkan dan membayar pajaknya dengan benar sebagai wujud tanggung jawab mereka. Sehingga kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Tambun & Riris, 2019). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Perdana (2020) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM. Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hapsari & Kholis (2020), yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Berdasarkan penjelasan mengenai Kesadaran Wajib Pajak, maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

**Ha<sub>5</sub>: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM**

## **2.15 Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, Mekanisme Pembayaran Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Kesadaran Wajib Pajak Secara Simultan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.**

Apabila wajib pajak merasa bahwa keadilan wajib pajak telah diterapkan kepada semua wajib pajak dengan tidak membedakan perlakuan antara wajib pajak badan dengan perorangan, wajib pajak besar dengan wajib pajak kecil dalam artian bahwa semua wajib pajak diperlakukan secara adil maka setiap wajib pajak cenderung untuk menjalankan kewajibannya dengan baik atau dengan kata lain menimbulkan kepatuhan dalam diri wajib pajak. Wajib pajak mempunyai kesadaran moral yang baik sebagai warga negara dalam melaksanakan kewajibannya berbeda dengan warga negara yang tidak mempunyai kesadaran moral. Seseorang yang berpendidikan akan mempunyai pengetahuan tentang perpajakan, baik itu soal NPWP, tarif yang akan dibayarkan, maupun manfaat NPWP dan pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat (Mintje, 2016)

Penelitian yang dilakukan oleh Cahyani dan Noviani (2019), yang menyatakan bahwa tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM baik secara simultan maupun secara parsial. Didukung pula oleh penelitian yang dilakukan oleh Perdana (2020), yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

## 2.16 Model Penelitian

**Gambar 2.1**  
**Model Penelitian**

